



LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
BULAN JULI TAHUN 2026



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak,S.E.,M.M. Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P. Namantus Gwijangge, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo,S.Pd Yaberius Kogoya, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M. Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes Nizmawati Abd Rahim, SKM., MKM.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si Timmi Gurik,SH.,M.TH.
Staff PPNP BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP. Asdiandri Kala' Patiung, S.Kom. Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II PEMBAHASAN	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan.....	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan.....	15
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si	35
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd).....	41
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)	51
BAB III PENUTUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

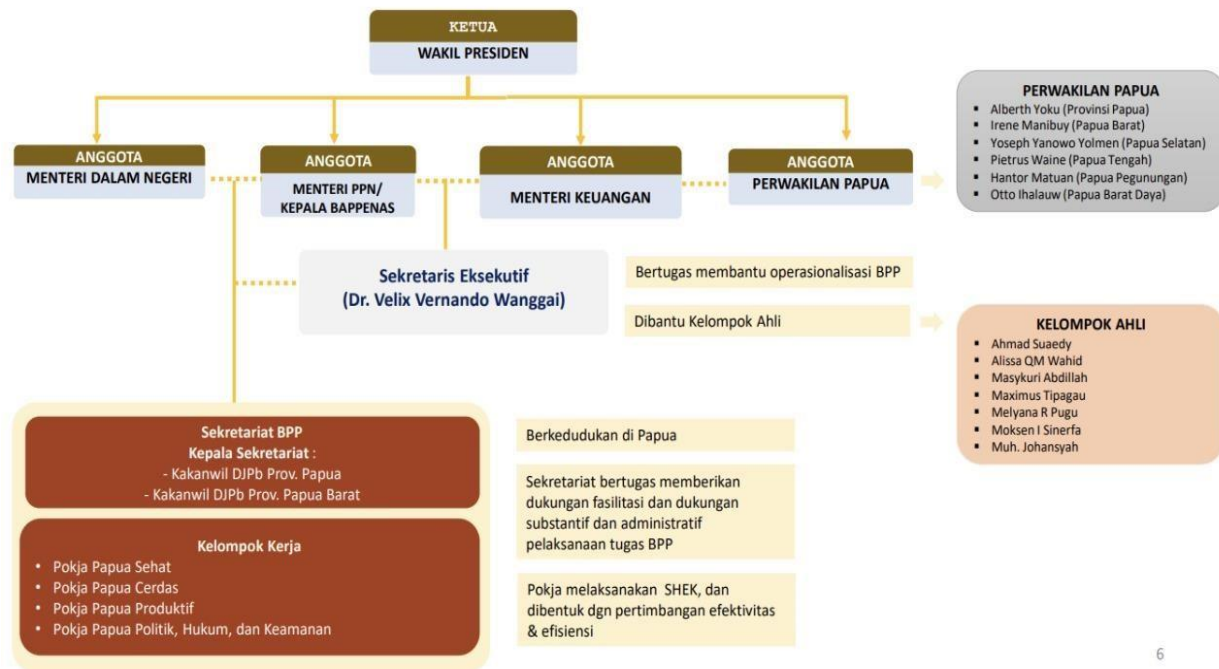
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



6

1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;

- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sarna dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

BAB II PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Bulan Juli tahun 2026 antara lain:

2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Diwakili Bapak Gaad Piranid Tabuni, S.P., M.M. (Pokja Papua Sehat)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Rapat Pengarahan dan Petunjuk Pelaksanaan Kerja Anggota BP3OKP oleh Kepala KPPN dan Sekretaris BPP
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu: Senin, 6 Juli 2026 Tempat: Ruang Rapat BPP Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Pengarahan, sosialisasi, dan pemahaman petunjuk kebijakan pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan kerja Anggota Pengarah BPP dan Pokja BP3OKP Triwulan III Tahun 2026.
Peserta Kegiatan	:	Narasumber Kegiatan: 1. Kepala KPPN Wamena. 2. Sekretaris BPP Provinsi Papua Pegunungan. Peserta Kegiatan: • 3 orang Anggota Pokja BP3OKP lama. • 5 orang Anggota Pokja BP3OKP baru.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Mewakili Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	Rapat terlaksana dengan hasil sebagai berikut: 1. Pengarahan dan pelaksanaan kerja sesuai petunjuk berdasarkan rencana kerja dan anggaran, dengan pelaksanaan yang disiplin, pencapaian hasil yang optimal, serta penyampaian laporan sesuai batas waktu pada Triwulan III ini. 2. Pembiayaan kinerja disesuaikan dengan anggaran yang terbatas sebagai dampak efisiensi anggaran Pemerintah Pusat. Terdapat rencana penambahan anggaran secara terbatas, karena terdapat perbandingan pembiayaan sebelumnya yang dikelola

		oleh Kanwil, sedangkan saat ini pembiayaan di KPPN secara langsung sangat minim. 3. Kegiatan berfokus pada konsistensi dan dampak terhadap output serta outcome, terdokumentasi, dan dipublikasikan di media secara konsisten serta bertanggung jawab. 4. Hasil kinerja dipublikasikan di media massa secara kontinu dengan memenuhi persyaratan sesuai petunjuk yang telah disampaikan. 5. Setiap tahapan kegiatan berdimensi pada Indikator Kinerja Utama (IKU). 6. Sistem penyusunan rencana kerja Anggota Pokja BP3OKP berbasis kelompok kerja. 7. Diskusi dan tanggung jawab. 8. Rencana kerja harus disertai dengan dokumen proposal.
Rencana Tindaklanjut	:	1. Menyusun rencana kerja Triwulan III Tahun 2026. 2. Menyusun 1 eksemplar proposal rencana kerja dan pembiayaan untuk bulan Juli 2026 dan akan dilanjutkan lagi untuk 2 bulan ke depan.
Dokumentasi Kegiatan	:	 22 Jul 2026 10:30:49 229° SW 0y Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya Papua Pegunungan Index number: 1631

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Kerja Anggota Pokja Papua Sehat Triwulan III (Juli–September) Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu: Selasa, 6 Juli 2026 Tempat: Ruang Rapat Anggota BPP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP melaksanakan Tusi SHEK berdasarkan rencana kerja selama 3 bulan (Juli–September) Tahun 2026. 4. Narasumber dan Peserta Kegiatan

		Narasumber/Tindak Lanjut: Arahan Kepala KPPN dan Sekretaris BPP.
Peserta Kegiatan	:	- Gaad P. Tabuni, S.P., M.M. – Anggota Pokja Papua Sehat. - Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes. – Anggota Pokja Papua Sehat. - Nizmawati Abd Rahim, S.KM., M.Kes. – Anggota Pokja Papua Sehat.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Mewakili Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	- Terlaksana diskusi dan tersusun rencana kegiatan dengan ketetapan topik kegiatan, penentuan lokasi, waktu, dan sasaran kegiatan yang terdiri atas 11 kegiatan dalam 3 bulan (Juli s.d. September). - Tersusun proposal dan pembiayaan. - Pembahasan persiapan dan diskusi lainnya. - Menyampaikan laporan kepada Sekretaris BPP.
Rencana Tindakan lanjut	:	- Konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja, serta sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. - Mengantisipasi dan menyiapkan solusi apabila terdapat perubahan serta melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu: Rabu–Jumat, 8–10 Juli 2026 Tempat: Hotel Grand Sartika, Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Peserta Kegiatan	:	Narasumber Kegiatan: 1. Ishak Yando – Staf Gubernur. 2. Ishak Yikwa – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi. 3. Gaad P. Tabuni – Mewakili Anggota BPP BP3OKP. 4. Gideon Rebanh – BKKBN Provinsi Papua Induk. Peserta Kegiatan: • 30 orang peserta dan staf dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Mewakili Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	• Pernyataan acara bersama. • Mengikuti acara pembukaan. • Diberi kesempatan untuk menyampaikan sosialisasi Tusi BP3OKP yang berhubungan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Rencana Tindaklanjut	:	• Disepakati bahwa kerja sama dan koordinasi akan terus ditingkatkan, khususnya dalam pemberdayaan OAP melalui pembinaan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi melalui program Keluarga Berencana.

Dokumentasi Kegiatan	:	 
----------------------	---	---

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu: Kamis, 16 Juli 2026 Tempat: Ruang Rapat Gubernur Provinsi Papua, Dok II Jayapura
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Sosialisasi perbaikan tata kelola Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam rangka pencegahan korupsi serta penandatanganan MoU antara KPK RI bersama Kementerian Pusat terkait dengan 6 Gubernur dan pejabat provinsi terkait di Tanah Papua.
Peserta Kegiatan	:	Narasumber Kegiatan: 1. Kepala dan staf lingkungan KPK RI. 2. Perwakilan Kementerian terkait. Peserta Kegiatan: • Gubernur, Ketua MRP, Ketua DPR, Anggota BP3OKP, dan instansi terkait dari 6 provinsi se-Tanah Papua.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Mewakili Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan

Hasil Kegiatan	:	Telah mengikuti Sosialisasi Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Otsus Papua dalam rangka pencegahan korupsi, serta menyaksikan dan turut menandatangani naskah Komitmen Kesepakatan.
Rencana Tindaklanjut	:	Melaksanakan Tusi SHEK terhadap implementasi pembangunan melalui dana Otsus di Pemerintahan Provinsi dan mencakup 8 kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Rapat Sosialisasi Implementasi Capaian Nilai Indeks Kinerja Utama (IKU) Anggota Pengarah dan Pokja BP3OKP di 6 BPP Provinsi se-Tanah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu: Kamis, 16 Juli 2026 (sore hari) Tempat: Ruang Rapat Kantor BPP Provinsi Papua Pukul: 16.30–18.00 WIT
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mengikuti sosialisasi implementasi capaian Nilai Indeks Kinerja Utama (IKU) Anggota Pengarah dan Pokja BP3OKP.
Peserta Kegiatan	:	Narasumber Kegiatan: Pejabat Sekretariat BPP Provinsi Papua: - Bpk. Sigit Purnomo - Bpk. Rahadian Setyo Noegroho

		3. Bpk. Joko Supriyanto Rindani Peserta Kegiatan: 6 Anggota Pengarah BPP Provinsi se-Tanah Papua beserta Staf Administrasi BPP Papua.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Mewakili Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	Tersosialisasinya penerapan capaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Anggota BPP dan Pokja BP3OKP yang terdiri atas 3 aspek indikator kinerja, yaitu: 1. Indeks Rata-Rata Ketepatan Waktu Laporan Kegiatan Bulanan. 2. Indeks Efektivitas Pembinaan Implementasi Program Percepatan Pembangunan Papua. 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik.
Rencana Tindaklanjut	:	Melanjutkan sosialisasi dan menerapkan secara langsung di lingkungan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam pelaksanaan kegiatan yang diawali pada Triwulan III Tahun 2026.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

Fransiscus Elosak, S.E.,M.M., Dafrin Muksin,S.IP., M.I.P., Namantus Gwijangge,S.IP.

1. Kegiatan Pokja Papua Polhukam BPP Papua Pegunungan

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Menghadiri Undangan Pelantikan Pegurus Forum Pemuda Muslim Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2026 bertempat di Gedung Baznas Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan koordinasi bertujuan untuk memantau perkembangan situasi keamanan, mengidentifikasi potensi gangguan kamtibmas, serta memperkuat sinergi dan kerja sama antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi konflik guna mencegah terjadinya eskalasi kekerasan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Perwakilan Pokja Polhukam Provinsi Papua Pegunungan (Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P) Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, Pengurus Forum Pemuda Muslim Papua Pegunungan yang dilantik, serta tamu undangan lainnya..
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Menghadiri kegiatan sebagai undangan, melakukan pemantauan, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan kerukunan masyarakat.
Misi/Keterangan	:	Melaksanakan pemantauan dan memperkuat koordinasi dengan organisasi kepemudaan dalam rangka mendukung stabilitas politik, keamanan, kerukunan masyarakat, serta pencegahan potensi konflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan.
Hasil Kegiatan	:	• Kegiatan Pelantikan Pengurus Forum Pemuda Muslim Papua Pegunungan Periode 2026–2029 berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

		Pelantikan ini menjadi momentum penguatan organisasi kepemudaan Islam di Papua Pegunungan sebagai wadah pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas generasi muda. • Dalam sambutannya, pengurus yang dilantik menyampaikan komitmen untuk menjadikan organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia, memperkuat nilai-nilai keagamaan, menjaga persatuan, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Seluruh peserta juga menegaskan pentingnya menjaga toleransi, memperkuat kolaborasi antarorganisasi kepemudaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah guna menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Meningkatkan sinergi antara Forum Pemuda Muslim Papua Pegunungan dengan pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah. • Mendorong pelaksanaan program pembinaan kepemudaan yang berorientasi pada penguatan karakter, toleransi, kepemimpinan, dan pemberdayaan masyarakat. • Mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan sebagai mitra pemerintah dalam menjaga persatuan, mencegah potensi konflik sosial, serta memperkuat kerukunan antarumat beragama di Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Keamanan Pasca Konflik Lanny Jaya-Kurima di Polsek Wamena Kota
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2026 di Kantor Polsek Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan koordinasi bertujuan untuk memantau perkembangan situasi keamanan, mengidentifikasi potensi gangguan kamtibmas, serta memperkuat sinergi dan kerja sama antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi konflik guna mencegah terjadinya eskalasi kekerasan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Perwakilan Pokja Polhukam Provinsi Papua Pegunungan (Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P) dan Wakapolsek Wamena Kota.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan Polsek Wamena Kota untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan situasi keamanan pasca konflik, mengidentifikasi potensi gangguan kamtibmas.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Pokja Polhukam dalam memperkuat sinergi dengan aparat keamanan guna mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan mencegah terjadinya konflik susulan di Kabupaten Jayawijaya.
Hasil Kegiatan	:	- Berdasarkan hasil koordinasi dengan Wakapolsek Wamena Kota, diperoleh informasi bahwa konflik perang suku antara masyarakat Lanny Jaya dan masyarakat Kurima telah diselesaikan melalui ritual adat <i>patah panah</i> yang dilaksanakan di Polres Jayawijaya sebagai bentuk penyelesaian secara adat. Meskipun demikian, kondisi keamanan di lapangan masih memerlukan perhatian karena potensi konflik belum sepenuhnya berakhir. - Hasil pemantauan menunjukkan bahwa masih terjadi beberapa insiden penyerangan yang dilakukan oleh

		sebagian kelompok masyarakat Kurima terhadap masyarakat Lanny Jaya, termasuk pembakaran beberapa rumah warga. Menyikapi kondisi tersebut, aparat keamanan terus meningkatkan patroli, pemantauan, dan pengamanan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan guna mencegah terjadinya eskalasi konflik serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Meningkatkan patroli dan pengamanan pada daerah yang masih berpotensi terjadi konflik. • Memperkuat koordinasi antara Pokja Polhukam, Kepolisian, Pemerintah Daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan. • Mendorong pelaksanaan dialog dan rekonsiliasi secara berkelanjutan melalui pendekatan adat, sosial, dan budaya guna memperkuat perdamaian. • Melaksanakan pemantauan berkala terhadap perkembangan situasi keamanan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan. • Mengintensifkan upaya deteksi dini dan mitigasi konflik untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.
Dokumenta si Kegiatan	:	 

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Pemantauan, Komunikasi, dan Koordinasi Mitigasi Konflik Horizontal Terkait Dinamika Penetapan Wakil Bupati Kabupaten Nduga.

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 28 Juni–7 Juli 2026 di Kabupaten Nduga, serta koordinasi dengan para pihak terkait di Jayapura, Wamena, dan Mimika.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaksanakan pemantauan, komunikasi, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mitigasi dan pencegahan konflik horizontal, serta menghimpun informasi sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Peserta Kegiatan	:	Anggota Pokja Papua Polhukan Provinsi Papua Pegunungan (Namantus Gwijangge, S.IP), aparat keamanan, DPRK Kabupaten Nduga, Bupati Kabupaten Nduga, kedua calon Wakil Bupati, serta tokoh adat dan pemangku kepentingan terkait.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Melaksanakan pemantauan, komunikasi, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mitigasi dan pencegahan konflik horizontal, serta menghimpun informasi sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya mitigasi konflik akibat dinamika penetapan Wakil Bupati Kabupaten Nduga yang berpotensi memicu konflik horizontal. Koordinasi dilakukan dengan aparat keamanan, DPRK, Bupati, kedua calon Wakil Bupati, dan tokoh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif melalui pendekatan dialog dan rekonsiliasi.
Hasil Kegiatan	:	Hasil pemantauan menunjukkan bahwa proses penetapan Wakil Bupati Kabupaten Nduga masih menimbulkan perbedaan pandangan antara kedua calon sehingga Rapat Paripurna DPRK pada 2 Juli 2026 ditunda akibat meningkatnya ketegangan. Kondisi tersebut berdampak pada situasi keamanan di Kabupaten Nduga dan meluas ke Jayapura, Wamena, serta Mimika. Selain memengaruhi stabilitas keamanan, kondisi ini juga berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pokja Papua Damai telah melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait guna mendorong penyelesaian

		secara damai dan mencegah terjadinya konflik horizontal.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Mendorong percepatan penyelesaian proses penetapan Wakil Bupati Kabupaten Nduga melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRK, aparat keamanan, serta para pihak terkait untuk menjaga kondusivitas daerah. • Meningkatkan pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi konflik di Kabupaten Nduga, Jayapura, Wamena, dan Mimika. • Mengedepankan dialog dan mediasi sebagai upaya penyelesaian perbedaan pandangan guna mencegah konflik horizontal. • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan hingga situasi keamanan dan penyelenggaraan pemerintahan kembali kondusif.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Menghadiri Undangan gelar hasil operasional pemusnahan hasil temuan minuman keras, ganja serta senjata tajam Triwulan 2 Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 20 Juli 2026 bertempat di Halaman Polres Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan operasi kepolisian selama Triwulan II Tahun 2026 sekaligus melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa minuman keras, ganja, dan senjata tajam sebagai bentuk komitmen Polres Kabupaten Jayawijaya dalam penegakan hukum, pemberantasan penyakit masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Peserta Kegiatan	:	Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Pokja Papua Polhukan BPP Provinsi Papua Pegunungan (Frans Elosak, SE., M.M dan Dafrin Muksin, S.IP., M.IP), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri Jayawijaya, instansi vertikal terkait, serta para tamu undangan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Menghadiri kegiatan sebagai undangan, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, serta membangun koordinasi dan sinergi dengan aparat keamanan dan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Jayawijaya.
Misi/Keterangan	:	Menghadiri undangan Polres Kabupaten Jayawijaya dalam kegiatan Gelar Hasil Operasional dan Pemusnahan Barang Bukti Triwulan II Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum, pencegahan peredaran minuman keras, narkoba, dan senjata tajam, serta memperkuat sinergi dengan Forkopimda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hasil Kegiatan	:	• Kegiatan Gelar Hasil Operasional dan Pemusnahan Barang Bukti Triwulan II Tahun 2026 berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Jayawijaya menyampaikan bahwa seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan berbagai kasus dan pelaksanaan operasi kepolisian selama periode Januari–Juni 2026. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi minuman keras, ganja, dan senjata tajam, termasuk sebanyak 5.407 batang tanaman ganja yang berhasil diamankan di wilayah hukum Polres Jayawijaya. • Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud transparansi Polres Jayawijaya kepada masyarakat dalam penegakan hukum sekaligus memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama unsur Forkopimda menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dalam memberantas peredaran narkoba, minuman keras ilegal, dan kepemilikan senjata tajam guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Meningkatkan operasi kepolisian secara berkelanjutan terhadap peredaran narkoba, minuman keras ilegal, dan kepemilikan senjata tajam. • Memperkuat sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. • Meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba, minuman keras ilegal, dan kepemilikan senjata tajam melalui kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi. • Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak

		hukum guna mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di wilayah Kabupaten Jayawijaya.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Bersama Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) jayawijaya Pasca Konflik Lanny Jaya-Kurima.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 17 Juli 2026 bertempat di Kediaman Ketua LMA Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan situasi pasca konflik Lanny Jaya–Kurima, mendorong peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik melalui pendekatan kearifan lokal, serta memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Pokja Papua Polhukan & Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan (Dafrin Muksin, S.IP., M.IP dan Yaberius Kogoya, S.IP) dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya.

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh adat sebagai bagian dari upaya deteksi dini, mitigasi potensi konflik, serta penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pasca konflik Lanny Jaya–Kurima.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan dilaksanakan untuk memperoleh informasi dan masukan dari tokoh adat mengenai perkembangan situasi pasca konflik, memperkuat peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik secara damai, serta membangun komitmen bersama dalam menjaga kondusivitas wilayah melalui pendekatan kearifan lokal.
Hasil Kegiatan	:	•Hasil koordinasi dengan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya menunjukkan bahwa kondisi keamanan pasca konflik Lanny Jaya–Kurima secara umum mulai berangsur kondusif, namun masih memerlukan pemantauan dan koordinasi secara berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi mengenai perkembangan situasi masyarakat, potensi kerawanan yang masih perlu diantisipasi, serta peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban dan mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah, perdamaian, dan kearifan lokal. •Koordinasi ini juga memperkuat sinergi antara Pokja Polhukam Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan dengan Lembaga Masyarakat Adat sebagai mitra strategis dalam mendukung upaya pencegahan konflik, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta penguatan stabilitas sosial di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Informasi dan masukan yang diperoleh menjadi bahan dalam penyusunan analisis situasi dan rekomendasi kebijakan guna mendukung terciptanya kondisi keamanan yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Meningkatkan koordinasi secara berkala dengan Lembaga Masyarakat Adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka deteksi dini potensi konflik. • Mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan adat yang didukung oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, dan para pemangku kepentingan. • Melaksanakan pemantauan lanjutan terhadap perkembangan situasi pasca konflik sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi dan rekomendasi kebijakan
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Bersama Sekretariat Daerah Kabupaten Lanny Jaya dalam rangka Pelaksanaan SHEK bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 18 Juli 2026 bertempat di Kediaman Sekretariat Daerah Kabupaten Lanny Jaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan Badan Pengarah Papua dalam pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna mendukung efektivitas pembangunan, menjaga stabilitas keamanan daerah, dan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Peserta Kegiatan	:	Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Pokja Papua Polhukan & Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua

		Pegunungan (Dafrin Muksin, S.IP., M.IP dan Yaberius Kogoya, S.IP) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lanny Jaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dalam rangka memperkuat sinergi pelaksanaan kegiatan SHEK, mendukung stabilitas keamanan daerah, serta mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Pengarah Papua.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan SHEK bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya yang dijadwalkan pada tanggal 21–22 Juli 2026. Koordinasi difokuskan pada penyamaan persepsi, kesiapan pelaksanaan kegiatan, dukungan pemerintah daerah, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program Badan Pengarah Papua.
Hasil Kegiatan	:	Koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Lanny Jaya menghasilkan kesepahaman mengenai kesiapan pelaksanaan kegiatan SHEK yang akan dilaksanakan pada tanggal 21–22 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan serta berkomitmen memfasilitasi koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, diperoleh kesepakatan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dengan Pokja Polhukam Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung pelaksanaan program strategis, memperkuat stabilitas keamanan, serta meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Meningkatkan koordinasi teknis antara Pokja Polhukam BPP dan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menjelang pelaksanaan SHEK.

		• Mengoptimalkan keterlibatan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. • Melaksanakan evaluasi bersama setelah kegiatan SHEK sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan program di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 7		
Nama Kegiatan	:	Pembukaan, Penyamaan Persepsi, dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Pegunungan bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
Pelaksanaan Kegiatan	:	Dilaksanakan pada 21 Juli 2026 bertempat di Ruangan Bupati Kabupaten Lanny Jaya.

(Waktu & Lokasi)		
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membangun kesamaan persepsi antara Badan Pengarah Papua dan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengenai tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua serta menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Pokja Papua Polhukan (Frans Elosak, SE., MM; Namantus Gwijangge, S.IP; dan Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P), Polkja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan, Bupati Kabupaten Lanny Jaya beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan sosialisasi tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya sebagai bagian dari penguatan sinergi dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan diawali dengan sambutan Bupati Kabupaten Lanny Jaya yang menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua. Selanjutnya dilaksanakan penyampaian materi mengenai tugas, fungsi, kewenangan, serta peran strategis Badan Pengarah Papua dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, yang dilanjutkan dengan diskusi dan penyamaan persepsi bersama seluruh perangkat daerah.
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan pembukaan, penyamaan persepsi, dan sosialisasi tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua menghasilkan kesamaan pemahaman antara Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan Badan Pengarah Papua mengenai peran strategis Badan Pengarah Papua dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Bupati Kabupaten Lanny Jaya beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyatakan dukungan terhadap penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program-program

		strategis yang mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. • Dalam kesempatan tersebut, Pokja Papua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Pokja Polhukam) memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengenai perlunya penguatan penanganan konflik sosial melalui penyusunan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan, mitigasi, penanganan, dan penyelesaian konflik sosial. Pokja Polhukam juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor, sistem deteksi dini, serta penanganan pasca konflik Lanny Jaya–Kurima melalui rekonsiliasi dan mediasi berbasis kearifan lokal guna menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan yang berkelanjutan di Kabupaten Lanny Jaya dan Provinsi Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Badan Pengarah Papua dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya secara berkelanjutan. Mendorong percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen penguatan mitigasi dan penyelesaian konflik. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan pasca konflik Lanny Jaya–Kurima melalui pelibatan pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat. Mengoptimalkan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi konflik sebagai upaya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 9		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pokja Papua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Pokja Polhukam) Badan Pengarah Papua bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 22 Juli 2026 bertempat di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya untuk menghimpun informasi strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan Badan Pengarah Papua, sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua serta menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Pokja Papua Polhukan BPP Provinsi Papua Pegunungan (Frans Elosak, SE., MM; Namantus Gwijangge, S.IP; dan Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P), Asisten II Sekretariat Daerah, Badan Kesbangpol, Bagian Hukum, Satpol PP, dan Satintelkam Polres Lanny Jaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Melaksanakan koordinasi, komunikasi, pemantauan, serta penghimpunan data dan informasi strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan sebagai dasar penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan program Pokja Polhukam Badan Pengarah Papua melalui koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya untuk mengidentifikasi berbagai isu strategis, tantangan, serta kebutuhan daerah dalam bidang politik, hukum, dan keamanan.
Hasil Kegiatan	:	Koordinasi menghasilkan sejumlah masukan strategis dari Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya terkait kondisi politik, hukum, dan keamanan daerah. Pembahasan difokuskan pada penguatan stabilitas politik, pencegahan konflik sosial, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan kebijakan yang mendukung implementasi

		Otonomi Khusus Papua. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan perlunya percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, penguatan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik, serta peningkatan kapasitas Satpol PP dalam mendukung penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum. Selain itu, seluruh peserta menyepakati pentingnya memperkuat pertukaran data dan informasi strategis, membangun forum koordinasi politik, hukum, dan keamanan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Badan Pengarah Papua, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan. • Mendorong percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial sebagai dasar hukum penanganan konflik di daerah. • Mengoptimalkan sistem deteksi dini, pertukaran data dan informasi strategis, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap potensi konflik. • Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, khususnya Satpol PP dan Kesbangpol, melalui dukungan sumber daya, sarana prasarana, dan penguatan kapasitas aparatur.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 10		
Nama Kegiatan	:	Menjadi Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang Diselenggarakan oleh Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 29 Juli 2026 bertempat di Aula SMA YPPGI Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Empat Pilar MPR RI sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung terciptanya stabilitas politik, hukum, dan keamanan di Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Pokja Papua Polhukan BPP Provinsi Papua Pegunungan Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P), Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan beserta Sekretariat, Ketua Yayasan YPPGI, Kepala Sekolah SMA YPPGI Wamena, dewan guru, siswa-siswi SMA YPPGI Wamena

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Pokja Papua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Pokja Papua Polhukam) melaksanakan tugas sebagai narasumber dengan memberikan materi mengenai implementasi nilai-nilai Empat Pilar MPR RI, penguatan wawasan kebangsaan, kesadaran hukum, serta pentingnya menjaga persatuan, ketertiban, dan stabilitas keamanan melalui partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat
Misi/Keterangan	:	Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan implementasi nilai-nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan melalui kolaborasi antara Anggota DPD RI, lembaga pendidikan, dan Pokja Papua Polhukam. Melalui sosialisasi ini diharapkan terbentuk generasi muda yang memiliki karakter kebangsaan, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mampu berperan dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hasil Kegiatan	:	- Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan tertib dan lancar serta mendapat respons positif dari peserta. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta mengenai nilai-nilai Empat Pilar MPR RI, memperkuat wawasan kebangsaan, kesadaran hukum, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik, hukum, dan keamanan di Provinsi Papua Pegunungan. - Pokja Papua Polhukam memandang bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR RI merupakan upaya strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan, kesadaran hukum, dan budaya damai. Kegiatan ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat keamanan, lembaga adat, dan masyarakat guna mendukung stabilitas politik, hukum, dan keamanan di Provinsi Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Mendorong pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara berkelanjutan pada satuan

		pendidikan di seluruh Provinsi Papua Pegunungan. • Memperkuat kerja sama antara DPD RI, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan Pokja Papua Polhukam dalam penguatan wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum bagi generasi muda. • Mengembangkan kegiatan pendidikan karakter, bela negara, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari upaya preventif dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S.Sos., M.Si, Timmi Gurik

Kegiatan	
Nama Kegiatan	: Kunjungan Pertemuan dan Audensi BP3OKP - Papua Produktif Dengan Para Ketua SPPG - MBG dan Ketua Satgas MBG Di Kab. Lanny Jaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor AST. 1 Kab. Lanny Jaya pada tanggal 22 Juli 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut : a. Untuk Perluasan Pendirian Dapur SPPG, Koodrdinasi dan Sinkronisasi Kegiatan MBG Antara Pengurus Dapur MBG dan Para Pelaku Usaha Penyuplai Bahan Pokok Dapur MBG. b. Untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Ekonomi Bagi Para Pelaku Usaha UMKM Dan EKRAF Pertanian. Untuk membantu mensukseskan Program MBG Di Kab. Lanny Jaya.
Peserta Kegiatan	: Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu : 1. Ketua Satgas BGN Kab. Lanny Jaya Para Ketua Dapur SPPG-MBG Kab. Lanny Jaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: SHEK
Misi/Keterangan	: Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	: Mendorong dan koordinasi agar kedepan para pelaku usaha pertanian dalam hal ini kelompok tabi sayur, ikan, ternak dan sembako agar langsung bisa mensuplai hasil panennya ke dapur MBG dengan jumlah, jenis dan kualitas yang telah ditetapkan.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	: Program nasional MBG dan kerjasama ini akan dikoordinasikan, dilaporkan dan dievaluasi kepada pemerintah daerah agar kerjasama dengan pemerintah, pimpinan satgas BGN dan pelaku usaha bisa berjalan dengan baik mulai dari kampung, distrik dan kabupaten.
Dokumentasi Kegiatan	: 

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan, Koordinasi dan Audensi BP3OKP-Papua Produktif dengan Delapan Kepala OPD Kab. Lanny Jaya dalam Rangka Optimalisasi Penggunaan Dana OTSUS, Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Menekankan Kemiskinan Ekstrem dan Menurunkan Nilai Inflasi di Wilayah Kab. Lanny Jaya.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Buapti dan Ruang Rapat Ast.1 Kab. Lanny Jaya pada tanggal 21 dan 22 Juli 2026.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Untuk mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan dana OTSUS Di bidang Ekonomi, Infrastruktur Rumah Khusus dan Energi. 2. Untuk menjalankan program strategis yang sudah disusun dan dianggarkan oleh masing-masing OPD. 3. Untuk menciptakan peluang lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi Masyarakat dengan memberi kesempatan bagi para pelaku usaha kontraktor, UMKM dan EKRAF OAP Kab. Lanny Jaya.
Peserta Kegiatan	:	Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu 1. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Kadis PU 3. Kadis PR 4. Kadis Koperasi dan UKM 5. Kadis Perindag 6. Kadis Parekraf 7. Ka. Baperinda dan BPMK
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	1. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan antara pimpinan OPD, para Kabid dan Pelaku usaha UMKM dan EKRAF agar bisa berkolaborasi untuk ikut terlibat dan mensukseskan program yang sudah disusun para OPD, Program nasional MBG dan KMP di Kab, Lanny Jaya. 2. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku usaha UMKM/EKRAF pertanian dan sembako.
Misi/Keterangan	:	Fokus utama diarahkan pada Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penguatan sektor ekonomi produktif, peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, serta pengembangan potensi unggulan daerah. Kegiatan ini menyoroti Langkah-langkah strategis dalam menekan laju inflasi di wilayah Kabupaten Lanny Jaya, melalui penguatan rantai pasok, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta peningkatan produksi dan distribusi komoditas lokal.
Hasil Kegiatan	:	Adapun hasil dari kegiatan ini adalah mendorong dan koordinasi agar kedepan para pelaku usaha kontraktor lokal, pelaku usaha pertanian dalam hal ini Kelompok Tani

		Sayur, Ikan, Ternak dan Sembako agar langsung bisa mensuplai hasil panennya ke koperasi KMP dan dapur SPPG-MBG dengan jumlah, jenis dan kualitas yang telah ditetapkan.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	Program kerja yang sudah disusun masing-masing OPD, Program Nasional MBG, Koperasi KMP dan AKSN dilaksanakan dengan kerjasama, dikoordinasikan, dilaporkan dan evaluasi kepada pemerintah daerah agar kerjasama dengan Pemerintah, Pimpinan OPD, Ketua satgas BGN dan Pelaku usaha bisa berjalan dengan baik mulai dari kampung, distrik dan kabupaten.
Dokumentasi Kegiatan	:	   

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Pendampingan BP3OKP – Papua Produktif di Acara Peresmian Sekaligus Launching Operasional Koperasi Provinsi Papua Pegunungan/KP3 Oleh Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Ruko/Gerai Koperasi KP3 Jl. Jenderal Sudirman, Wamena pada tanggal 24 Juli 2026.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut : 1. Untuk memberi dorongan dan sebagai percontohan menghidupkan koperasi-koperasi dan pengurusnya yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. 2. Untuk membantu menampung dan memasarkan hasil panen masyarakat petani OAP. 3. Untuk menciptakan peluang lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberi kesempatan bagi para pelaku usaha pertanian, UMKM dan EKRAF OAP untuk bekerjasama dari hasil usahanya. 4. Untuk bekerjasama dan menjalin hubungan bisnis dengan Daerah/Provinsi lain untuk barter hasil komoditi yang dibutuhkan dari masing-masing Daerah/Provinsi.

Peserta Kegiatan	:	Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu ; 1. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan 2. Sekretaris Daerah 3. Kadis Koperasi dan UKM 4. Karo Ekonomi 5. Para kepala OPD Anggota Pengurus Koperasi
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	1. Mengharmonisasikan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan antara pimpinan daerah Provinsi dan delapan Kabupaten, Pimpinan OPD, Para Kabid dan Pelaku usaha UMKM dan EKRAF agar bisa berkolaborasi untuk ikut terlibat dalam pendirian koperasi primer umum dan Program Nasional Koperasi Merah Putih. 2. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku usaha koperasi, UMKM / EKRAF dan masyarakat petani OAP.
Misi/Keterangan	:	Peresmian dan launching operasional KP3 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperluas akses pembiayaan, memperkuat jaringan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Dengan adanya dukungan adanya dukungan dan pendampingan yang berkelanjutan, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing.
Hasil Kegiatan	:	Mendampingi, mendorong, evaluasi dan koordinasi agar kedepan para pelaku usaha koperasi lokal, pelaku usaha pertanian dalam hal ini kelompok tani sayur, ikan, ternak, home industry dan kerajinan lokal agar langsung bisa bekerjasama dan mensuplai hasil panennya ke koperasi KP3 KMP.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	Pendirian koperasi primer dan KMP diwilayah Provinsi Papua Pegunungan yang sudah disusun program kerja dan pendiriannya oleh masing-masing Dinas Koperasi dan UKM di 8 Kabupaten akan dilaksanakan dengan kerjasama, dikoordiansikan, dilaporkan dan dievaluasi kepada pemerintah Provinsi agar kerjasama dengan Pemerintah, Pimpinan OPD Dinas terkait, Ketua koperasi dan pelaku usaha OAP bisa berjalan dengan baik mulai dari kampung, distrik dan kabupaten serta bisa keluar wilayah Provinsi.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan dan Pendampingan BP3OKP - Papua Profuktif di Acara Pameran Nasional oleh Dinas Parekraf Provinsi Papua Pegunungan di Jogjakarta.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Jogja City Mall - Jogjakarta pada tanggal 02 - 05 Juli 2026.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mempromosikan hasil produk-produk kearifan lokal daerah Provinsi Papua Pegunungan ke Kancan Nasional 2. Untuk membantu para pelaku usaha EKRAF OAP agar hasil produknya bisa menembus pasar dan bisa bersaing di pasar nasional 3. Untuk menciptakan dan melatih daya saing bagi para pelaku EKRAF OAP, serta meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberi kesempatan bagi para pelaku usaha EKRAF OAP untuk bekerjasama internal dan eksternal dari hasil produk usahanya. 4. Untuk bekerjasama dan menjalin hubungan bisnis dengan Daerah/ Provinsi lain untuk barter hasil komoditi yang dibutuhkan dari masing-masing Daerah/Provinsi.
Peserta Kegiatan	:	Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu 1. Dinas Parekraf Se-Indonesia 2. Pejabat Dinas Parekraf 3. Pelaku Usaha EKRAF Kerajinan Lokal 4. Pelaku Usaha Home Industri 5. Pelaku Usaha EKRAF Kopi Papua Pegunungan Pelaku EKRAF Hasil Pertanian
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	1. Mengharmonisasikan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan antara Pimpinan Daerah/Provinsi dan 8 Kabupaten, Pimpinan OPD, Para Kabid dan Pelaku usaha UMKM dan EKRAF agar bisa berkolaborasi untuk ikut terlibat dalam mempromosikan, memasarkan dan mensupport hasil produk kearifan lokal dari para pelaku usaha EKRAF OAP. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku usaha EKRAF OAP.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan potensi lokal, khususnya produk unggulan UMKM dan ekonomi kreatif Papua Pegunungan, sekaligus memperluas jejaring serta peluang pasar di Tingkat nasional. Pendampingan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing produk lokal, mendorong inovasi, serta meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam memasarkan produknya.

Hasil Kegiatan	:	Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu adalah mendampingi, mendorong, evaluasi dan koordinasi agar kedepan para pelaku usaha EKRAF OAP dalam hal ini Kelompok Kopi Lokal, Gapoktan, Home industri dan Kerajinan lokal bisa lebih baik lagi dalam mengelola dan memasarkan hasil komoditi unggulan produk-produk kearifan lokal khas Provinsi Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	1. Para pelaku usaha EKRAF akan kita bina dan selalu kita libatkan disetiap event-event penting, baik nasional maupun internasional agar produk-produk khas kearifan lokal kita bisa terangkat dan bisa menjadi icon/branded daerah. 2. Mendorong ke masing-masing Dinas PAREKRAF di 8 Kabupaten agar bisa Kerjasama, Mengkoordinasikan, Melaporkan dan Mengevaluasi dengan para pelaku usaha EKRAF OAP agar kedepan bisa berjalan dengan lebih baik.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan

Paul Wetipo, S.Pd., Yaberius Kogoya, S.IP.

1. Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Papua Pegunungan

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Penguatan Akses Pendidikan D-III Keperawatan bagi Orang Asli Papua bersama Poltekkes Kemenkes Jayapura Program Studi D-III Keperawatan Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2026, bertempat di Kantor Ketua Program Studi D-III Keperawatan Wamena, Poltekkes Kemenkes Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya untuk memperoleh data dan informasi mengenai program prioritas bidang pendidikan, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan pendidikan, serta menyusun rekomendasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan, Yaberius Kogoya, S.IP, Papua Sehat, dan Ketua Program Studi D-III Keperawatan Wamena
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan SDM Orang Asli Papua (OAP) melalui peningkatan akses pendidikan, program afirmasi, dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Misi/Keterangan	:	Melaksanakan koordinasi dengan Poltekkes Kemenkes Jayapura Program Studi D-III Keperawatan Wamena untuk memperkuat akses pendidikan tenaga kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP), mendorong program afirmasi pendidikan, serta mendukung pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

		.
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan koordinasi menghasilkan kesepakatan bahwa penguatan pendidikan D-III Keperawatan bagi Orang Asli Papua merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Papua Pegunungan. Pokja Papua Cerdas mendorong delapan pemerintah kabupaten meningkatkan dukungan melalui program beasiswa afirmasi dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus guna memperluas akses pendidikan tenaga kesehatan. Pokja Papua Cerdas juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang telah membuka kelas khusus bagi OAP dengan pembiayaan pemerintah daerah, serta mendorong agar program tersebut menjadi model bagi kabupaten lain dalam memperkuat pengembangan SDM kesehatan lokal.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Mendorong pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kuota serta memperluas program beasiswa afirmasi bagi putra-putri Orang Asli Papua yang menempuh pendidikan D-III Keperawatan. Memperkuat kerja sama antara Poltekkes Kemenkes Jayapura Program Studi D-III Keperawatan Wamena, pemerintah daerah, dan Badan Pengarah Papua dalam pengembangan SDM kesehatan sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten. Menyusun peta kebutuhan tenaga kesehatan serta mengembangkan kelas khusus bagi Orang Asli Papua sebagai dasar perencanaan pendidikan, pemberian beasiswa, dan penempatan lulusan guna mendukung pemerataan pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Pengembangan Pendidikan dan SDM Orang Asli Papua Berbasis Budaya bersama Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 17 Juli 2026 bertempat di Kediaman Ketua LMA Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jayawijaya dalam mendukung pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia Orang Asli Papua berbasis budaya serta mendorong pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan SDM di Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Pokja Papua Cerdas, Yaberi Kogoya, S.IP, Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan dan Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua melalui penguatan kebijakan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP), serta pelestarian nilai-nilai budaya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Misi/Keterangan	:	Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jayawijaya guna memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pendidikan, pembangunan SDM Orang Asli Papua berbasis budaya, serta mendorong integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pelaksanaan program pendidikan.
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan koordinasi menghasilkan kesepakatan mengenai pentingnya peran Lembaga Masyarakat Adat dalam mendukung pembangunan pendidikan dan pengembangan SDM Orang Asli Papua yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dalam pertemuan tersebut dibahas pentingnya pelestarian budaya sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda Papua serta perlunya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan lembaga pendidikan dalam mendukung program afirmasi pendidikan. Pokja Papua Cerdas menyampaikan

		masukannya agar nilai-nilai budaya lokal diintegrasikan dalam proses pendidikan melalui muatan lokal, penguatan pendidikan karakter, serta pelibatan tokoh adat dalam pembinaan generasi muda. Selain itu, Pokja Papua Cerdas mendorong peningkatan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua melalui program beasiswa dan pengembangan kapasitas SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga mampu melahirkan generasi Papua yang berpendidikan, berkarakter, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Memperkuat kemitraan antara Lembaga Masyarakat Adat, pemerintah daerah, dan Badan Pengarah Papua dalam pengembangan pendidikan dan SDM Orang Asli Papua berbasis budaya. Mendorong integrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari penguatan karakter generasi muda Papua. Mengembangkan program afirmasi pendidikan, beasiswa, dan peningkatan kapasitas SDM Orang Asli Papua yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan pelestarian budaya lokal.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Bersama Sekretariat Daerah Kabupaten Lanny Jaya dalam rangka Pelaksanaan SHEK bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 18 Juli 2026 bertempat di Kediaman Sekretariat Daerah Kabupaten Lanny Jaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan Badan Pengarah Papua dalam pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna mendukung efektivitas pembangunan, menjaga stabilitas keamanan daerah, dan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Peserta Kegiatan	:	Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Pokja Papua Polhukan & Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan (Dafrin Muksin, S.IP., M.IP dan Yaberius Kogoya, S.IP) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lanny Jaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dalam rangka memperkuat sinergi pelaksanaan kegiatan SHEK, mendukung stabilitas keamanan daerah, serta mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Pengarah Papua.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan SHEK bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya yang dijadwalkan pada tanggal 21–22 Juli 2026. Koordinasi difokuskan pada penyamaan persepsi, kesiapan pelaksanaan kegiatan, dukungan pemerintah daerah, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program Badan Pengarah Papua.
Hasil Kegiatan	:	Koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Lanny Jaya menghasilkan kesepakatan mengenai kesiapan pelaksanaan kegiatan SHEK yang akan dilaksanakan pada tanggal 21–22 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan serta berkomitmen memfasilitasi koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, diperoleh kesepakatan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara

		Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dengan Pokja Polhukam Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung pelaksanaan program strategis, memperkuat stabilitas keamanan, serta meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Meningkatkan koordinasi teknis antara Pokja Polhukam BPP dan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menjelang pelaksanaan SHEK. • Mengoptimalkan keterlibatan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. • Melaksanakan evaluasi bersama setelah kegiatan SHEK sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan program di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Penguatan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Pegunungan bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 21 Juli 2026 bertempat di Ruangn Bupati Kabupaten Lanny Jaya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya untuk memperoleh data dan informasi mengenai program

		prioritas bidang pendidikan, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan pendidikan, serta menyusun rekomendasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Pokja Papua Cerdas, Yabarius Kogoya, S.IP, Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Produktif, Pokja Papua Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan, Bupati Kabupaten Lanny Jaya beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lanny Jaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua melalui penguatan koordinasi, penyelarasan program prioritas, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP).
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas melaksanakan koordinasi dan komunikasi bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya untuk menyelaraskan program prioritas bidang pendidikan, memperkuat pembangunan SDM Orang Asli Papua, serta mendorong implementasi program afirmasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan koordinasi menghasilkan kesamaan persepsi antara Badan Pengarah Papua dan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengenai pentingnya penguatan sinergi dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, khususnya pada sektor pendidikan. Pokja Papua Cerdas menyampaikan masukan agar Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua melalui optimalisasi program beasiswa, pengembangan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi sesuai kebutuhan daerah, serta penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan SDM yang kompeten. Selain itu, Pokja Papua Cerdas mengusulkan agar program pembangunan pendidikan

		diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas serta daya saing SDM OAP secara berkelanjutan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan Badan Pengarah Papua dalam pelaksanaan program prioritas bidang pendidikan dan pengembangan SDM OAP. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk mendukung program beasiswa afirmasi, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua sesuai kebutuhan daerah. Memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dalam menyiapkan SDM OAP yang berkualitas dan berdaya saing guna mendukung pembangunan Kabupaten Lanny Jaya.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Pokja Papua Cerdas Badan Pengarah Papua dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2026, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya untuk memperoleh data dan informasi mengenai program prioritas bidang pendidikan, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan

		pendidikan, serta menyusun rekomendasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan, Yaberius Kogoya, S.IP, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya beserta jajaran.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan sektor pendidikan dalam rangka mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta menghimpun data dan informasi sebagai bahan rekomendasi kebijakan Badan Pengarah Papua.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan koordinasi dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan sektor pendidikan di Kabupaten Lanny Jaya serta mengidentifikasi program prioritas yang memerlukan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Pembahasan difokuskan pada percepatan peningkatan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Otonomi Khusus Papua.
Hasil Kegiatan	:	Koordinasi antara Pokja Papua Cerdas Badan Pengarah Papua dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya menghasilkan kesamaan persepsi mengenai arah penguatan pembangunan pendidikan sebagai bagian dari implementasi Otonomi Khusus Papua. Pembahasan difokuskan pada beberapa program prioritas, yaitu pengembangan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, pengembangan sekolah unggulan di tingkat kabupaten yang diarahkan menjadi sekolah unggulan Provinsi Papua Pegunungan, serta optimalisasi program beasiswa bagi peserta didik, khususnya Orang Asli Papua. Selain itu, dibahas kebutuhan percepatan renovasi dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan kondusif. Dinas Pendidikan juga menyampaikan perlunya pemenuhan dan pemerataan tenaga guru sesuai kebutuhan di setiap distrik, disertai peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Sebagai dasar penyusunan kebijakan dan

		perencanaan pembangunan pendidikan, disepakati pentingnya pemutakhiran data sekolah yang mencakup jumlah satuan pendidikan, peserta didik, tenaga pendidik, serta kondisi sarana dan prasarana secara akurat dan berkelanjutan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya untuk menyusun prioritas program pengembangan Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, dan program beasiswa yang selaras dengan kebijakan Otonomi Khusus Papua. Mendorong percepatan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah serta pemenuhan dan pemerataan tenaga guru guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Lanny Jaya. Mendorong pemutakhiran dan integrasi data pendidikan secara berkala sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan yang tepat sasaran.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan

Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M., Oliphina Rumbekwan,S.KM., M.Kes., Nizmawati Abd Rahim,SKM.,MKM

Laporan Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP

Kegiatan 1: Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan		Koordinasi dan evaluasi penguatan pembangunan sumber daya manusia kesehatan lokal melalui program pendidikan tenaga kesehatan di provinsi papua pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)		Poltekkes Kemenkes Jayapura Program Studi D-III Keperawatam Wamena, 13 Juli 2026, 09.30 - selesai
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi Anggota Pokja dengan Ketua Program Studi D-III Keperawatam Wamena
Peserta Kegiatan		1. Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan 2. Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan 3. Poltekkes Kemenkes Jayapura Program Studi D-III Keperawatam Wamena
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan		Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan		Papua Sehat
Hasil Kegiatan		Dalam Hal ini, Tujuan Kunjungan Pokja Papua Sehat yakni: 1. Memperkuat sinergi antara BP3OKP Papua Pegunungan, BPP, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan kesehatan dalam mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di wilayah Papua Pegunungan. 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan mahasiswa kesehatan yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah, khususnya mahasiswa Program Studi D-III Keperawatan Wamena, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama proses pendidikan.

	3. Menyusun strategi pengembangan tenaga kesehatan lokal melalui peningkatan akses pendidikan kesehatan bagi putra-putri asli Papua Pegunungan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten, distrik, hingga kampung. 4. Mendorong setiap kabupaten di wilayah Papua Pegunungan untuk mengembangkan kelas pendidikan keperawatan atau program pendidikan tenaga kesehatan lokal sebagai langkah menyiapkan tenaga kesehatan yang berasal dari daerah sendiri. 5. Mendorong adanya dukungan pembiayaan pendidikan melalui sumber dana Otonomi Khusus (Otsus) agar mahasiswa kesehatan dapat menyelesaikan pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi. 6. Menyelaraskan kebutuhan tenaga kesehatan daerah dengan program pendidikan yang dilaksanakan, sehingga lulusan tenaga kesehatan dapat kembali mengabdikan dan memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat Papua Pegunungan. Lokasi Kunjungan: 1. Poltekkes Kemenkes Jayapura Program Studi D-III Keperawatam Wamena Peserta Pertemuan: 1. Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan ➤ Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes ➤ Nizmawati Abd Rahim, SKM., MKM 2. Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan ➤ Yaberius Kogoya, S.IP, 3. Kaprodi Poltekkes Kemenkes Jayapura Program Studi D-III Keperawatam Wamena ➤ Suningsih Suabey, S.Tr.Kep., Ns., S.Pd., M.Pd Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui: 1. Penyampaian kondisi dan perkembangan pendidikan mahasiswa kesehatan.
--	---

	2. Diskusi evaluasi program pendidikan kesehatan yang telah berjalan. 3. Identifikasi kebutuhan tenaga kesehatan daerah. 4. Penyusunan langkah strategis penguatan pendidikan tenaga kesehatan lokal. 5. Penguatan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga pengarah pembangunan Otsus, dan institusi pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan juga dibahas pengalaman Pemda Kabupaten Jayawijaya dalam mendukung pendidikan mahasiswa kesehatan, termasuk dukungan terhadap mahasiswa keperawatan, kebidanan, dan gizi. Program tersebut menjadi contoh yang dapat dikembangkan oleh kabupaten lain seperti Lanny Jaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, dan Yahukimo. Hasil Pembahasan: 1. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan mahasiswa kesehatan ➤ Membahas perkembangan mahasiswa kesehatan yang telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. ➤ Mengidentifikasi jumlah mahasiswa, proses pendidikan, dukungan pembiayaan, serta kendala yang dihadapi selama masa pendidikan. 2. Pembahasan penguatan pendidikan keperawatan lokal ➤ Mengkaji peluang pengembangan kelas keperawatan di setiap kabupaten wilayah Papua Pegunungan. ➤ Mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten dalam menyiapkan calon tenaga kesehatan lokal. 3. Evaluasi kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah Papua Pegunungan ➤ Membahas kondisi kekurangan tenaga kesehatan pada sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya Puskesmas. ➤ Menyusun arah kebijakan agar lulusan tenaga kesehatan dapat diprioritaskan kembali mengabdikan di daerah asal.
--	---

	4. Pembahasan dukungan pembiayaan pendidikan mahasiswa kesehatan ➤ Mengidentifikasi kebutuhan beasiswa dan dukungan pembiayaan bagi mahasiswa kesehatan. ➤ Mendorong pemanfaatan dana Otsus sebagai instrumen pembangunan SDM kesehatan yang berkelanjutan. 5. Penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan ➤ Membahas peningkatan kualitas pendidikan, pelaksanaan praktik lapangan, pembinaan mahasiswa, serta kesiapan lulusan memasuki dunia kerja pelayanan kesehatan. Kesimpulan: 1. Terbangunnya koordinasi dan sinergi antara BP3OKP Papua Pegunungan, BPP, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan dalam pengembangan SDM kesehatan lokal. 2. Tersusunnya gambaran kondisi pendidikan mahasiswa kesehatan Papua Pegunungan, termasuk kebutuhan dukungan pembiayaan, fasilitas pendidikan, dan pendampingan selama proses pendidikan. 3. Adanya rekomendasi pengembangan kelas keperawatan pada setiap kabupaten di Papua Pegunungan sebagai strategi mencetak tenaga kesehatan dari masyarakat lokal. 4. Teridentifikasinya kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah Papua Pegunungan, terutama kebutuhan tenaga keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat distrik dan kampung. 5. Adanya dorongan penguatan dukungan beasiswa dan pembiayaan pendidikan melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi mahasiswa kesehatan. 6. Meningkatnya komitmen kerja sama antara pemerintah daerah dan Poltekkes Kemenkes Jayapura Program Studi D-III Keperawatan Wamena dalam meningkatkan kualitas lulusan tenaga kesehatan.
--	--

		7. Tersedianya arah kebijakan penempatan lulusan tenaga kesehatan lokal agar mahasiswa yang telah mendapatkan dukungan pendidikan dapat kembali mengabdikan di daerah asal. 8. Terbentuknya komitmen bersama untuk menjadikan pembangunan SDM kesehatan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Papua Pegunungan hingga tingkat distrik dan kampung.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut		Tindak Lanjut: A. Penyusunan Peta Kebutuhan Tenaga Kesehatan Papua Pegunungan Rekomendasi: Perlu dilakukan penyusunan data dan analisis kebutuhan tenaga kesehatan berbasis kabupaten, distrik, dan kampung sebagai dasar perencanaan pendidikan serta penempatan lulusan tenaga kesehatan. ➤ BP3OKP Papua Pegunungan melalui Pokja Papua Sehat melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan pemerintah kabupaten untuk memperoleh data kebutuhan tenaga kesehatan. ➤ Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga keperawatan, kebidanan, gizi, dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kondisi pelayanan kesehatan. ➤ Menjadikan hasil pemetaan sebagai dasar pengembangan program pendidikan tenaga kesehatan lokal. Output: Tersedianya dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan Papua Pegunungan sebagai dasar perencanaan pembangunan kesehatan. 1. Penguatan Program Pendidikan Tenaga Kesehatan Lokal Berbasis Kabupaten Rekomendasi: Pemerintah kabupaten di wilayah Papua Pegunungan perlu didorong untuk mengembangkan program pendidikan tenaga kesehatan lokal sesuai kebutuhan daerah masing-masing. ➤ Mendorong setiap kabupaten memiliki program atau kelas pendidikan keperawatan/tenaga kesehatan.

	➤ Melakukan koordinasi dengan institusi pendidikan kesehatan untuk membuka peluang kerja sama pendidikan. ➤ Memprioritaskan putra-putri asli Papua Pegunungan sebagai peserta program pendidikan kesehatan. Output: Terbentuknya skema pengembangan pendidikan tenaga kesehatan lokal di masing-masing kabupaten.
	3. Penguatan Dukungan Pembiayaan Pendidikan melalui Dana Otsus Rekomendasi: Perlu dilakukan penguatan kebijakan dukungan pembiayaan pendidikan mahasiswa kesehatan melalui sumber dana Otonomi Khusus sebagai bagian dari investasi pembangunan SDM Papua. ➤ Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengalokasian dukungan beasiswa mahasiswa kesehatan. ➤ Menyusun mekanisme pendataan, seleksi, dan pengawasan penerima bantuan pendidikan. ➤ Memastikan mahasiswa kesehatan memperoleh dukungan hingga menyelesaikan pendidikan. Output: Tersedianya dukungan pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi mahasiswa kesehatan Papua Pegunungan.
	4. Penguatan Dukungan Pembiayaan Pendidikan melalui Dana Otsus Rekomendasi: Perlu dilakukan penguatan kebijakan dukungan pembiayaan pendidikan mahasiswa kesehatan melalui sumber dana Otonomi Khusus sebagai bagian dari investasi pembangunan SDM Papua. ➤ Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengalokasian dukungan beasiswa mahasiswa kesehatan. ➤ Menyusun mekanisme pendataan, seleksi, dan pengawasan penerima bantuan pendidikan.

	➤ Memastikan mahasiswa kesehatan memperoleh dukungan hingga menyelesaikan pendidikan. Output: Tersedianya dukungan pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi mahasiswa kesehatan Papua Pegunungan.
	5. Penguatan Kerja Sama BP3OKP, BPP, Pemerintah Daerah, dan Institusi Pendidikan Rekomendasi: Perlu dibangun forum koordinasi berkelanjutan untuk memastikan program pendidikan tenaga kesehatan berjalan sesuai target pembangunan Otsus. ➤ Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program pendidikan kesehatan. ➤ Membentuk mekanisme komunikasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan. ➤ Mengawal kesesuaian program pendidikan dengan target RIPP dan RAPP bidang kesehatan. Output: Terwujudnya koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan dalam pembangunan SDM kesehatan Papua Pegunungan.
	6. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kompetensi Mahasiswa Kesehatan Rekomendasi: Selain peningkatan jumlah mahasiswa, perlu dipastikan peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi lulusan tenaga kesehatan. ➤ Mendukung pelaksanaan praktik lapangan mahasiswa pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. ➤ Mendorong peningkatan kompetensi klinis dan profesional mahasiswa. ➤ Memperkuat pembinaan karakter pelayanan kesehatan berbasis budaya lokal Papua.

		Output: Meningkatnya kualitas lulusan tenaga kesehatan yang profesional dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. 7. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Program oleh Pokja Papua Sehat BPP Rekomendasi: Pokja Papua Sehat BPP perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan pengembangan SDM. ➤ Melakukan evaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa kesehatan. ➤ Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program. ➤ Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan kebijakan. Output: Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pembangunan SDM kesehatan sebagai bahan pengambilan kebijakan. Rekomendasi Tindak Lanjut kepada Pemerintah Daerah: Berdasarkan hasil Koordinasi dan evaluasi penguatan pembangunan sumber daya manusia kesehatan lokal melalui program pendidikan tenaga kesehatan di provinsi papua pegunungan disampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut: 1. Melakukan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah kabupaten terkait penguatan program pendidikan tenaga kesehatan lokal. 2. Menyusun database mahasiswa kesehatan asal Papua Pegunungan yang sedang menempuh pendidikan dan kebutuhan dukungannya. 3. Mendorong penyusunan kebijakan dukungan beasiswa tenaga kesehatan melalui dana Otsus.
--	--	--

	4. Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan pada seluruh kabupaten di Papua Pegunungan sebagai dasar penempatan lulusan. 5. Membangun kerja sama berkelanjutan antara BP3OKP/BPP, pemerintah daerah, dan Poltekkes Kemenkes Jayapura untuk memastikan keberlanjutan program pendidikan tenaga kesehatan lokal. Pengembangan tenaga kesehatan lokal Papua Pegunungan harus ditempatkan sebagai program prioritas pembangunan Otonomi Khusus karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pelayanan kesehatan, serta percepatan kemandirian pembangunan daerah sesuai arah kebijakan RIPP dan RAPP Papua.
Dokumentasi Kegiatan	



Kegiatan 2: Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Percepatan Transformasi Kesehatan dan Penguatan SDM Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kantor Bupati Lanny Jaya 21 - 22 Juli 2026 10.00 - selesai

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melakukan Sinkronisasi, dan Harmonisasi
Peserta Kegiatan	:	A. Badan Pengarah Papua 1. Anggota Pokja Papua Sehat ➤ Gaad Piramid Tabuni, S.P., M.M ➤ Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes ➤ Nizmawati Abd Rahim, SKM., MKM 2. Anggota Pokja Papua Polhukam ➤ Dafrin Muksin, S.IP., M.IP ➤ Namantus Gwijangge, S.IP ➤ Frans Elosak 3. Anggota Pokja Papua Cerdas ➤ Yaberius Kogoya, S.IP 4. Anggota Pokja Papua Kreatif ➤ Yoyo ➤ Timmi Gurik, SH., M.Th B. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya 1. Bupati Kabupaten Lanny Jaya 2. Bapedda Kabupaten Lanny Jaya 3. OPD Terkait C. Rumah Sakit Umum Daerah Tiom 1. Direktur RSUDTiom D. Dinas Kesehatan 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya 2. Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pemangku Kepentingan Bidang Kesehatan
Tugas dan Fungsi	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi

Kegiatan yang di laksanakan		
Misi/Keterangan	:	1. Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	A. Tujuan Kegiatan Kegiatan koordinasi BP3OKP Pokja Papua Sehat bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya bertujuan untuk: 1. Mendorong percepatan transformasi kesehatan di Kabupaten Lanny Jaya dan Provinsi Papua Pegunungan melalui penguatan kebijakan, program, dan tata kelola pelayanan kesehatan. 2. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar lebih tepat sasaran dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan. 3. Mengidentifikasi berbagai kendala dan kebutuhan pelayanan kesehatan, khususnya terkait ketersediaan tenaga kesehatan, sarana prasarana, sistem rujukan, serta akses pelayanan di wilayah sulit geografis dan keamanan. 4. Mendorong peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, termasuk pengembangan RSUD Tiom menuju rumah sakit Kelas C dan penguatan pelayanan puskesmas berbasis Integrasi Layanan Primer (ILP). 5. Memperkuat pemenuhan dan pengembangan SDM kesehatan, termasuk dokter spesialis, tenaga kesehatan strategis, serta pengembangan tenaga kesehatan asli Papua. B. Uraian Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 1. Pertemuan koordinasi BP3OKP Pokja Papua Sehat dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya ➤ Pembahasan arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.

		➤ Identifikasi kebutuhan prioritas pembangunan kesehatan daerah. ➤ Sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. 2. Pembahasan pemanfaatan Dana Otsus sektor kesehatan ➤ Mendengarkan paparan pemerintah daerah terkait rencana penggunaan Dana Otsus Tahun 2026. ➤ Mengidentifikasi kebutuhan dukungan anggaran untuk pelayanan kesehatan, penguatan SDM kesehatan, obat-obatan, laboratorium, dan fasilitas pelayanan dasar. 3. Evaluasi kondisi pelayanan kesehatan Kabupaten Lanny Jaya ➤ Pembahasan perkembangan fasilitas kesehatan, termasuk peningkatan jumlah puskesmas dari 10 menjadi 28 unit. ➤ Identifikasi kendala keterbatasan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. ➤ Evaluasi kebutuhan tenaga medis, tenaga kesehatan kontrak, serta dukungan operasional pelayanan. 4. Pembahasan pengembangan RSUD Tiom ➤ Evaluasi kesiapan peningkatan status RSUD Tiom dari Kelas D menjadi Kelas C. ➤ Pembahasan kebutuhan pengembangan sarana fisik, penyelesaian hak ulayat dan sertifikat tanah, fasilitas rumah dinas, kendaraan operasional, serta bank darah rumah sakit. ➤ Pembahasan strategi pemenuhan dokter spesialis melalui pendidikan lanjutan. 5. Pembahasan pengendalian penyakit prioritas ➤ Evaluasi penanganan HIV, TBC, DBD, dan kusta. ➤ Penguatan peran tenaga kesehatan dan kader masyarakat dalam penemuan kasus, pendampingan, dan pengobatan.
--	--	---

		6. Rekomendasi percepatan pembangunan kesehatan Papua Pegunungan ➤ Fokus prioritas meliputi peningkatan mutu rumah sakit, penguatan sistem rujukan, pemenuhan SDM kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan. C. Hasil Kegiatan Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain: 1. Terlaksananya koordinasi antara BP3OKP Pokja Papua Sehat dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dalam rangka percepatan pembangunan sektor kesehatan. 2. Teridentifikasinya kebutuhan dan permasalahan utama pelayanan kesehatan Kabupaten Lanny Jaya, meliputi: ➤ Keterbatasan tenaga kesehatan; ➤ Kebutuhan dokter spesialis; ➤ Kendala pembangunan fasilitas kesehatan akibat persoalan tanah adat; ➤ Keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan rumah sakit. 3. Tersusunnya rekomendasi penguatan penggunaan Dana Otsus sektor kesehatan yang diarahkan pada: ➤ Penguatan SDM kesehatan; ➤ Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; ➤ Peningkatan mutu pelayanan kesehatan; ➤ Penguatan sistem rujukan. 4. Adanya komitmen peningkatan kapasitas RSUD Tiom melalui: ➤ Persiapan peningkatan status rumah sakit dari Kelas D menjadi Kelas C; ➤ Pengembangan fasilitas pelayanan; ➤ Pemenuhan tenaga dokter dan dokter spesialis;
--	--	--

		➤ Penguatan fasilitas pendukung seperti bank darah dan rumah dinas tenaga kesehatan. 5. Tersusunnya fokus prioritas Roadmap Kesehatan Otonomi Khusus Papua Pegunungan, meliputi: ➤ Pemenuhan tenaga kesehatan strategis; ➤ Penguatan pelayanan primer melalui ILP; ➤ Penguatan sistem rujukan; ➤ Penanganan stunting, HIV, TBC, malaria, dan penyakit prioritas lainnya; LAPORAN SINGKAT HASIL TEMUAN BIDANG KESEHATAN A. Pembukaan dan Gambaran Umum Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan yang menyampaikan capaian program kesehatan serta berbagai kendala yang masih dihadapi. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai, serta beberapa indikator program yang belum mencapai target yang diharapkan, bahkan masih berada di bawah standar. B. Temuan Pelayanan Kesehatan Tingkat Distrik dan Puskesmas 1. Kabupaten memiliki 39 distrik dengan jumlah Puskesmas yang sebelumnya 23 unit dan telah bertambah menjadi 37 unit, namun sebagian masih dalam proses registrasi. 2. Terdapat kendala operasional pada beberapa Puskesmas, antara lain: ➤ Puskesmas Wanubarat belum dapat berfungsi optimal karena lokasi saat ini digunakan oleh TNI akibat situasi dan kondisi keamanan. ➤ Puskesmas Beam Geolome ditemukan adanya tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas selama
--	--	--

		kurang lebih 1 tahun, namun tetap menerima pembayaran gaji. C. Temuan Kasus Penyakit ➤ Ditemukan 1 kasus penyakit Lepra/Morbus Hansen atas nama Selfina Wenda dari Kampung Bonom. Pasien belum mendapatkan pengobatan karena ketersediaan obat belum tersedia. ➤ Pada bulan Juli 2026 ditemukan 1 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) impor di RSUD Tiom, Kabupaten Lanny Jaya. ➤ Berdasarkan laporan Bidang Pelayanan Kesehatan terdapat 37 kasus Tuberkulosis (TBC), sementara data penyakit malaria masih dalam proses pengolahan. D. Kondisi RSUD Tiom Direktur RSUD, Bapak Niko Yoku, menyampaikan bahwa kendala utama rumah sakit masih berkaitan dengan keterbatasan SDM: 1. Dari total 70 ASN, hanya sekitar 20 orang yang aktif bekerja. 2. Sekitar 70% tenaga rumah sakit merupakan tenaga honorer. Saat ini sedang disusun rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe C tiga lantai melalui pengampuan bersama Kementerian Kesehatan yang direncanakan mulai pembangunan pada Januari 2027. Persiapan yang sedang dilakukan meliputi: ➤ Pelepasan tanah adat. ➤ Pengurusan sertifikat tanah. ➤ Penyelesaian aspek administrasi agar tidak menjadi kendala pembangunan di masa mendatang. Luas lahan yang dipersiapkan sekitar 7.000 m².
--	--	--

Rekomendasi / Rencana Tindaklanjut	:	Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan 1. Melakukan sinkronisasi program pembangunan kesehatan Kabupaten Lanny Jaya dengan RIPP dan RAPP Papua melalui program prioritas kesehatan sebagai dasar pengawalan BP3OKP Pokja Papua Sehat. 2. Mendorong pemanfaatan Dana Otsus kesehatan yang lebih tepat sasaran untuk penguatan SDM kesehatan, peningkatan fasilitas pelayanan, obat-obatan, dan sistem rujukan. 3. Mengawal pemenuhan SDM kesehatan strategis, termasuk dokter spesialis, tenaga kesehatan profesional, serta pengembangan tenaga kesehatan asli Papua. 4. Mendorong percepatan peningkatan status RSUD Tiom dari Kelas D menuju Kelas C melalui pemenuhan sarana prasarana, fasilitas penunjang, penyelesaian status tanah, dan dukungan tenaga kesehatan. 5. Mendorong penguatan pelayanan kesehatan primer melalui implementasi ILP serta peningkatan kapasitas puskesmas sesuai standar pelayanan. 6. Memperkuat program prioritas kesehatan Papua Pegunungan, khususnya penanganan HIV/AIDS, TBC, malaria, stunting, gizi buruk, imunisasi, dan penurunan kematian ibu serta bayi. 7. Mendorong pembentukan Forum Sinkronisasi Program Kesehatan Otsus Papua Pegunungan sebagai wadah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi lintas sektor. 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi pembangunan kesehatan Kabupaten Lanny Jaya sebagai bahan pengendalian dan rekomendasi kebijakan BP3OKP Pokja Papua Sehat.
------------------------------------	---	--

Dokumentasi Kegiatan	:	  
-----------------------------	----------	--



Kegiatan 3: Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Audiensi BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Pokja Papua Sehat dengan Direktur RSUD Wamena terkait Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Regional.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	RSUD Wamena, Kabupate Jayawijaya, Papua Pegunungan 29 Juli 2026 10.00 - selesai
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melakukan Sinkronisasi, dan Harmonisasi

Peserta Kegiatan	:	A. Badan Pengarah Papua 1. Anggota Pokja Papua Sehat ➤ Gaad Piramid Tabuni, S.P., M.M ➤ Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes ➤ Nizmawati Abd Rahim, SKM., MKM C. Rumah Sakit Umum Daerah Wamena 1. Direktur RSUD Wamena
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	2. Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	A. Tujuan Kegiatan Kegiatan audiensi BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Pokja Papua Sehat dengan Direktur RSUD Wamena bertujuan untuk: 1. Mengidentifikasi kondisi terkini pelayanan kesehatan di RSUD Wamena sebagai rumah sakit rujukan regional yang melayani delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. 2. Menggali informasi terkait kesiapan RSUD Wamena dalam implementasi 11 layanan prioritas nasional bidang kesehatan. 3. Mengidentifikasi berbagai kendala operasional rumah sakit, meliputi aspek pembiayaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pelayanan pasien, serta pengelolaan limbah medis. 4. Mendapatkan masukan dan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan regional Papua Pegunungan.

		5. Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Pegunungan. B. Uraian Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan dalam audiensi tersebut meliputi: 1. Pembukaan dan penyampaian maksud serta tujuan audiensi ➤ Penyampaian peran BP3OKP Pokja Papua Sehat dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan. ➤ Penjelasan tujuan pengumpulan informasi terkait kondisi dan kebutuhan RSUD Wamena. 2. Pemaparan kondisi pelayanan RSUD Wamena ➤ Penyampaian profil RSUD Wamena sebagai rumah sakit pengampu bagi delapan kabupaten. ➤ Pembahasan implementasi 11 layanan prioritas nasional, meliputi: a) Kanker; b) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); c) Stroke; d) Mata; e) Kesehatan jiwa; f) Gastrohepatologi; g) Uronefrologi; h) Jantung; i) Tuberkulosis dan respirasi; j) Infeksi emergency; k) Diabetes melitus.
--	--	--

		3. Pembahasan dukungan dan kendala operasional rumah sakit ➤ Evaluasi pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk sektor kesehatan. ➤ Pembahasan keterbatasan pembiayaan operasional, biaya logistik obat, pemeliharaan alat kesehatan, dan pengelolaan fasilitas rumah sakit. ➤ Pembahasan dukungan pemerintah terhadap penguatan BLUD RSUD Wamena. 4. Pembahasan sarana, prasarana, dan pengelolaan lingkungan rumah sakit ➤ Kondisi instalasi pengolahan air limbah (IPAL). ➤ Kendala pengujian kualitas limbah. ➤ Pengelolaan sampah medis dan kebutuhan fasilitas pendukung. ➤ Kondisi sanitasi dan kapasitas fasilitas rumah sakit. 5. Pembahasan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan ➤ Identifikasi kebutuhan tenaga spesialis dan tenaga pendukung. ➤ Pembahasan kebutuhan tenaga elektromedik, administrasi, hukum, dan akuntansi. ➤ Usulan pengembangan tenaga kesehatan lokal melalui pendidikan khusus. 6. Pembahasan sistem pelayanan pasien ➤ Evaluasi antrean pelayanan pasien. ➤ Kendala sistem verifikasi Face Recognition Integrated System. ➤ Usulan alternatif pelayanan saat gangguan jaringan. ➤ Pembahasan pemisahan jalur pelayanan pasien baru, kontrol, dan rujukan. 7. Perumusan tindak lanjut dan rekomendasi
--	--	--

		➤ Penyampaian hasil diskusi sebagai bahan rekomendasi BP3OKP kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. ➤ Identifikasi prioritas penguatan pelayanan kesehatan regional. C. Hasil Kegiatan Output yang dihasilkan dari kegiatan audiensi ini adalah: 1. Tersedianya informasi dan data kondisi pelayanan RSUD Wamena ➤ Kondisi implementasi 11 layanan prioritas nasional. ➤ Kebutuhan pengembangan fasilitas, tenaga kesehatan, dan peralatan medis. 2. Teridentifikasinya berbagai kendala utama pelayanan kesehatan ➤ Keterbatasan pembiayaan operasional rumah sakit. ➤ Keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas pendukung. ➤ Kendala pengelolaan limbah medis. ➤ Kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. ➤ Kendala sistem antrean dan pelayanan pasien. 3. Tersusunnya bahan rekomendasi penguatan sistem kesehatan Papua Pegunungan ➤ Dukungan pembiayaan operasional rumah sakit. ➤ Penguatan BLUD RSUD Wamena. ➤ Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan fasilitas pelayanan. ➤ Pengembangan sumber daya manusia kesehatan. ➤ Peningkatan sistem pelayanan rujukan regional. 4. Terbangunnya koordinasi dan sinergi antara BP3OKP Pokja Papua Sehat dan RSUD Wamena ➤ Sebagai langkah mempercepat peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan.
--	--	--

		5. Adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat ➤ Dengan fokus pada penguatan layanan KIA, mata, dan layanan prioritas nasional lainnya sesuai standar Kementerian Kesehatan. LAPORAN SINGKAT HASIL TEMUAN KONDISI DAN PENGEMBANGAN RSUD WAMENA A. Gambaran Umum RSUD Wamena merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C yang telah memperoleh status akreditasi Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sejak tanggal 1 Desember 2023. Selain itu, RSUD Wamena telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 8 Januari 2025. Berdasarkan kebijakan Kementerian Kesehatan, pengembangan rumah sakit saat ini tidak lagi hanya berdasarkan klasifikasi tipe rumah sakit, tetapi diarahkan berdasarkan pemenuhan layanan prioritas dan kemampuan pelayanan. RSUD Wamena saat ini sedang dipersiapkan menuju kategori layanan Madya sesuai dengan ketentuan regulasi terbaru Kementerian Kesehatan. B. Pengembangan Layanan Prioritas Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, RSUD Wamena diarahkan untuk memenuhi 11 layanan prioritas nasional, yaitu: 1. Kanker; 2. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); 3. Stroke; 4. Mata; 5. Kesehatan jiwa;
--	--	--

		6. Gastrohepatologi; 7. Uronefrologi; 8. Jantung; 9. Tuberkulosis dan respirasi; 10. Infeksi emergency; 11. Diabetes melitus. Sesuai Permenkes terbaru, standar layanan rumah sakit dikembangkan dalam empat kategori, yaitu: 1. Paripurna 2. Utama 3. Madya 4. Dasar RSUD Wamena saat ini mempersiapkan peningkatan menuju kategori Madya, yang membutuhkan dukungan: ➤ Ketersediaan tenaga kesehatan dan sumber daya manusia yang kompeten; ➤ Pemenuhan sarana dan prasarana; ➤ Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan; ➤ Dukungan pemerintah pusat melalui program penguatan rumah sakit (SHIREN). C. Kondisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan data tahun 2024, kondisi SDM RSUD Wamena terdiri dari: ➤ PNS sebanyak 275 orang (59%); ➤ Non ASN sebanyak 192 orang (41%). Pada tahun 2026, hasil rekrutmen PNS Kabupaten Jayawijaya memberikan tambahan sebanyak 160 orang tenaga PNS untuk memperkuat pelayanan RSUD Wamena. Diharapkan seluruh tenaga Non ASN yang tersedia dapat terakomodasi melalui proses rekrutmen sehingga kebutuhan tenaga pelayanan dapat terpenuhi.
--	--	---

		D. Kondisi Keuangan dan Pembiayaan 1. Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima RSUD Wamena sebesar kurang lebih Rp1 miliar per tahun. ➤ Tahun sebelumnya pencairan dilakukan pertengahan tahun sehingga penyerapan anggaran kurang optimal. ➤ Tahun 2026 pencairan dilakukan lebih awal sehingga realisasi anggaran sudah berjalan lebih baik, namun masih terdapat kendala dalam optimalisasi penggunaan dana. 2. Pembiayaan dari BPJS Kesehatan sangat membantu operasional rumah sakit, terutama untuk: ➤ Penyediaan makanan dan minuman pasien; ➤ Pengadaan obat-obatan; ➤ Pembiayaan pelayanan melalui sistem paket INA-CBGs. 3. Kendala yang dihadapi adalah kebutuhan perencanaan anggaran yang lebih baik, terutama untuk pemeliharaan sarana dan alat kesehatan. E. Sarana dan Prasarana Beberapa kendala sarana dan prasarana yang ditemukan antara lain: 1. Pemeliharaan alat kesehatan ➤ Menjadi salah satu tantangan utama rumah sakit. ➤ Dibutuhkan tenaga elektromedik untuk pemeliharaan dan perawatan alat kesehatan. 2. Pengelolaan limbah rumah sakit ➤ Insinerator tidak dapat digunakan lagi karena berpotensi menyebabkan pencemaran udara. ➤ Limbah medis mencapai sekitar 300 kg per hari. ➤ Jika dikirim ke Jayapura membutuhkan biaya sekitar Rp80.000/kg atau sekitar Rp24 juta per hari.
--	--	---

		➤ Sedang diupayakan pengadaan alat penghancur limbah medis. 3. Permasalahan sanitasi ➤ Kondisi air limbah masih keruh. ➤ Toilet sering mengalami kepenuhan sehingga membutuhkan penyedotan berkala. 4. Fasilitas rumah tunggu ➤ Belum tersedia rumah tunggu bagi keluarga pasien, terutama pasien rujukan dari daerah terpencil. F. Permasalahan Pelayanan Kesehatan Beberapa kasus dan kendala pelayanan yang ditemukan: 1. Terdapat kasus bayi lahir dengan kelainan jantung berada di luar tubuh, yang membutuhkan penanganan khusus dan menunggu berat badan bayi mencapai sekitar 3 kg sebelum dilakukan tindakan lanjutan. 2. Sistem rujukan pasien membutuhkan pembiayaan untuk: ➤ 1 pasien; ➤ 1 anggota keluarga pendamping; ➤ 1 tenaga medis pendamping. 3. Obat-obatan kedaluwarsa (expired) titipan dari pemerintah provinsi perlu dilakukan evaluasi dan penataan agar tidak terjadi pemborosan. 4. Untuk pelayanan BPJS diperlukan penguatan administrasi kepesertaan, termasuk penggunaan KTP Jayawijaya dengan dukungan rekam data elektronik/foto biometrik. G. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelaksanaan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap berjalan sebagai bagian dari evaluasi mutu pelayanan rumah sakit. Namun diperlukan penguatan
--	--	---

		sistem pencatatan dan pelaporan agar capaian pelayanan dapat terukur dengan baik. H. Temuan Data yang Masih Dibutuhkan Dalam rangka evaluasi lebih lanjut, masih diperlukan: ➤ Data capaian indikator pelayanan rumah sakit; ➤ Data lengkap sumber daya manusia; ➤ Data kebutuhan tenaga berdasarkan jenis layanan prioritas; ➤ Data kondisi sarana dan prasarana; ➤ Data penggunaan dan realisasi anggaran. I. Kesimpulan RSUD Wamena telah memiliki dasar yang kuat sebagai rumah sakit dengan status Akreditasi Paripurna dan penerapan BLUD, serta sedang diarahkan menuju penguatan layanan prioritas kategori Madya. Namun, masih terdapat beberapa tantangan utama yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu pemenuhan SDM, pemeliharaan alat kesehatan, pengelolaan limbah, peningkatan sarana prasarana, serta penguatan sistem pembiayaan dan administrasi pelayanan. Diperlukan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Kementerian Kesehatan, dan pihak terkait untuk memastikan RSUD Wamena mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat di wilayah pegunungan Papua.
Rekomendasi / Rencana Tindaklanjut	:	Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan 1. Mendorong penguatan dukungan pembiayaan RSUD Wamena melalui optimalisasi dana Otsus, APBD, dan penguatan tata kelola BLUD untuk mendukung

		operasional, obat-obatan, pemeliharaan alat kesehatan, dan pelayanan pasien. 2. Mendukung percepatan pemenuhan 11 layanan prioritas nasional melalui penyediaan tenaga kesehatan, alat kesehatan, serta sarana pendukung sesuai standar Kementerian Kesehatan. 3. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, khususnya ruang rawat inap, instalasi pendukung, sanitasi, dan pengelolaan limbah medis. 4. Memperkuat pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, termasuk tenaga spesialis dan tenaga pendukung seperti elektromedik, melalui rekrutmen dan pengembangan SDM lokal. 5. Melakukan perbaikan sistem pelayanan pasien, termasuk penguatan sistem antrean, solusi gangguan jaringan pelayanan, dan peningkatan efisiensi alur pelayanan. 6. Memperkuat koordinasi lintas sektor antara BP3OKP, Pemerintah Daerah, RSUD Wamena, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung RSUD Wamena sebagai pusat rujukan regional Papua Pegunungan. 7. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai bahan penguatan sistem kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	



Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Dialog Strategis wakil menteri PPN,Kepala Bappenas dengan Gubernur dan Bupati / Walikota se Tanah Papua.
Pelaksanaan Kegiatan	:	Via Zoom

(Waktu & Lokasi)	:	Jam : 09 WIT – 12 .43 WIT / Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Untuk menyamakan arah kebijakan dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Papua dimana berfungsi sebagai forum koordinasi,sinkronisasi,dan pengambilan kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pembangunan di tanah Papua lebih efektif,terintegrasi,dan berdampak bagi masyarakat.
Peserta Kegiatan	:	Anggota BPP Papua Pegunungan (Diwakili Pokja Papua sehat) , Oliphina Rumbekwan ,SKM ,M,Kes.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi.
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	▪ Sambutan sekaligus pembukaan yang di buka oleh wakil Menteri PPN/ Wakil kepala bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard S.I.P;M.A. lebih mengarah pada konteks percepatan pembangunan papua,yaitu tentang RIPPP yang merupakan dokumen jangka panjang (2022 – 2041) Dengan Visi : Terwujudnya” Papua Mandiri,Adil,dan sejahtera”,dengan 3 misi utama - papua sehat - Papua cerdas - Papua Produktif ▪ Isu dan tantangan utama pembangunan papua Visi,misi,sasaran,arah kebijakan,dan strategi Prioritas dan fokus pembangunan agar Sinergis antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan. ▪ mekanisme pelaksanaan pelaporan,pemantauan,evaluasi,pengendalian dan pengawasan di lakukan oleh Pemerintah Daerah dan pusat. ▪ RAPP/RAPPP (Rencana Aksi Percepatan Pembangunan papua) 2025 -2029,termasuk prioritas program,19 program percepatan ,dan bagaimana RAPPP di integrasikan kedalam musrembang Otsus,SIPD,RKPD,dan APBD.sehingga dapat terukur, dan terstruktur ▪ Diharapkan bahwa alur Perencanaan Pembangunan Daerah ,termasuk yang di biyai melalui otonomi khusus papua (Otsus) Papua sebaiknya mengikuti mekanisme: ➤ Musrembang otsus

		➤ RKPD(Rencana kerja Pemerintah Daerah) ➤ SIPD (Sistim Informasi daerah) ➤ APBD ➤ Pelaksanaan ,Monitoring dan Evaluasi ▪ SIKD umumnya meliputi; APBD,realisasi pendapatan dan belanja, pembiayaan,laporan keuangan daerah,informasi transfer ke daerah termasuk dana otsus sesuai ketentuan berlaku.Dengan demikian diharapkan dapat mengakomodir seluruh perencanaan dari tingkat masyarakat Desa sehingga perencanaan tepat sasaran dan menyentuh masyarakat. Beberapa usulan dari Gubernur dan wakil gubernur serta Bupati seTanah Papua Antara lain: ❖ Ketua Asosiasi Gubernur setanah Papua (6) Propinsi : Meki Fritz Nawipa bahwa telah di cantumkan dalam 11 point hasil kesepakatan bersama Gubernur setanah Papua tertanggal 11 mei 2026 yang akan dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung RIPPP dan RA PPP dengan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. ❖ Usulan dari beberapa Gubernur dan wakil Gubernur serta Para Bupati: - Kab.kota yang sulit akses seperti papua pegunungan dan papua tengah dengan tingkat kemahalan yang tinggi ,perencanaan pembangunan (infrastruktur) yang belum tuntas,subsidi angkutan dan biaya hidup yang tinggi. - Situasi hari ini (Efisiensi),dan inflasi besar – besaran,p3k menjadi tanggung jawab Daerah. Dana DAK di tiadakan ,pemotongan dana transfer (anggaran di ubah –ubah untuk peruntukkannya ,tidak konsekwen). - MBG banyak menyerap dana tidak efisien juga koperasi merah putih yang di lakukan tanpa perencanaan yang baik(SDM belum siap tidak sesuai dengan konteks Daerah). - Perlu adanya riset serta pendampingan tata kelolah oleh Bapennas. - DAK Infrastruktur di tambah ,demikian pun dengan efisiensi yang terjadi saat ini khususnya Tanah Papua agar uu otonomi khusus efisiensi ini di tiadakan,masalah complex (P3K sebaiknya di ambil alih oleh pusat).
--	--	--

		- Sengketa tiga pulau di Papua barat daya agar segera di selesaikan oleh kementrian dalam negri, agar tidak menjadi polemic yang berkepanjangan. ❖ Adapun masukan dari Deputi bidang Pembangunan kewilayahan adalah: - Menyusun satu arah pembangunan Tanah papua, sehingga program pusat ,provinsi,kabupaten/ kota saling mendukung, bukan berjalan sendiri – sendiri - Memastikan hasil dialog di tindak lanjuti dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, RENJA, APBD), sehingga tidak berhenti sebagai rekomendasi - Memperkuat koordinasi lintas Provinsi di tanah papua untuk menangani isu bersama seperti: konektivitas, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi. - Mengawal implementasi otomi khusus Papua agar lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui program yang terukur dan tepat sasaran. - Mendorong penggunaan data yang akurat ,sinkronisasi program lintas kementrian/ lembaga, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian pembangunan - Menyelesaikan berbagai hambatan pelaksanaan program melalui koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah. ❖ Ibu Sahli / Pak Yoga / Pak Ilmawan - Sinkronisasi ,keselarasan RAPP adalah upaya bersama yang harus di damping dan di perkuat. - Konektivitas perlu di tingkatkan, terutama tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pusat. - Tipologi daerah yang berbeda- beda perlu ada tenaga Fungsional dalam pendampingan di tanah papua dalam menyusun RIPPP dan RAPP. - Kelembagaan anggota BP3OKP (badan pengarah di 6 Propinsi) di bawah naungan 3 Kementrian lebih diperkuat sehingga dapat menyuarakan ke Tingkat pusat yang dipimpin oleh Wakil Presiden.
--	--	---

Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	➤ Menyatukan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua. ➤ Mempercepat pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat di tanah Papua. ➤ Membentuk tim asistensi atau tim koordinasi bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten /kota untuk mengawal monitoring dan evaluasi hasil dialog ➤ Menyusun rencana aksi (action plan) yang memuat program prioritas, target, jadwal, pelaksanaan, penanggung jawab, dan kebutuhan pendanaan. ➤ Mengintegrasikan hasil dialog ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui musrembang otonomi khusus, RKPD, SIPD, dan APBD. ➤ Menetapkan indikator keberhasilan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga terbentuk siklus perencanaan yang berkelanjutan yaitu: planning, budgeting, implementasion, monitoring – dan evaluation, learning, improvement kemudian kembali ke planning maka perencanaan berikutnya menjadi lebih efektif, tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan. ➤ pembinaan dan sistim khususnya isi dari RIPP dan RAPP yang muatannya ada 19 program kegiatan, sebaiknya dibahas setiap tahun ,(penguatan hasil musrembang otsus) ➤ konektivitas perlu di tingkatkan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. ➤ Sinkronisasi ,keselarasan RIPP dan RAPP serta pendampingan intensif perlu di perkuat agar selaras dengan RPJMN. ➤ Membentuk tim asistensi baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. ➤ Kerjasama lebih erat ,terukur dan terstruktur oleh pemerintah daerah dengan berpihakan kepada masyarakat.

Dokumentasi Kegiatan	:	 
----------------------	---	---

BAB III PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

Wamena, 8 Agustus 2026
a.n. Anggota BPP Provinsi Papua
Pegunungan



GAAD PIRANID TABUNI, S.P., M.M.